

## **BAB III**

### **KERJASAMA PEMBUATAN ALUTSISTA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN, AMERIKA, RUSIA, DAN CHINA**

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam upaya mengembangkan alutsista buatan sendiri, Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan berbagai Negara di dunia, yaitu seperti Korea Selatan, Amerika, Rusia, dan China. Maka, dalam bab ini akan membahas tentang kerjasama pertahanan Indonesia dengan Negara-negara tersebut.

#### **A. Kerjasama Pembuatan Alutsista antara Indonesia dengan Korea Selatan**

Sejarah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan sangatlah singkat bila dibandingkan dengan sejarah hubungan Indonesia-Belanda dan Korea-Jepang. Pada awal berjalannya hubungan diplomatik Indonesia dengan dua Korea, Indonesia lebih condong kepada Korea Utara. Pada zaman orde lama di Indonesia, Achmad Husein memproklamasikan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI). Untuk menghadapi gerakan separatism itu dan untuk memulihkan keamanan Negara, pemerintah memutuskan untuk melancarkan operasi militer. Pada waktu itulah, Presiden pertama Korea Selatan Rhee Syngman telah mengemukakan keinginannya untuk bekerjasama dalam bidang politik dan sango mengirinkan serombongan pasukan sukarelawan untuk menolong PRRI. Para pengamat politik internasional pun merasa heran dengan keputusan Presiden Rhee. Hal ini dikarenakan pada saat itu Korea Selatan masih

berada dalam kerusakan besar yang diakibatkan oleh Perang Korea. Oleh karena itu, Presiden Soekarno sangat marah dan mulai melancarkan kebijakan diplomatik anti-Korea Selatan.

Kedua pemimpin Indonesia dan Korea Selatan ini memiliki sifat yang sangat berbeda dalam menentukan pendapat mereka, sehingga mereka saling mencurigai satu sama lain. Presiden Soekarno lebih cenderung berpihak kepada Beijing, Hanoi, dan Pyongyang (ibukota Korea Utara) yang memiliki ideologi sosialisme dan bersikap sangat keras terhadap blok kapitalisme. Sedangkan Presiden Rhee pro kepada Blok Barat. Presiden Soekarno tidak begitu tertarik dengan Negara-negara di Asia Timur, kecuali Jepang. Jika Presiden Rhee dapat meningkatkan hubungannya dengan Jepang, mungkin saja hubungan Indonesia-Korea Selatan dapat dijalin lebih awal. Namun, Presiden Rhee memiliki sifat yang keras terhadap Jepang, dikarenakan penjajahan yang telah dilakukan Jepang di Korea Selatan selama 35 tahun. Sebaliknya, hubungan Indonesia dengan Korea Utara malah semakin maju, kedua belah pihak saling memberikan bantuan di masa orde lama.

Kemudian pada tahun 1962, pihak Korea Selatan mulai melakukan pendekatan terhadap Indonesia supaya kedua Negara ini bisa menjalin hubungan kenegaraan secara resmi. Pada saat itu, Kim Jong Pil (Kepala Badan Intelijen Nasional Korea) bertemu dengan presiden Soekarno. Kim Jong Pil menjelaskan mengenai sifat pemerintah Korea Selatan yang baru dan berbeda dengan pemerinahan sebelumnya dan menitikberatkan pula pada kepentingan kerjasama Indonesia-Korea Selatan. Kemudian, tanggapan resmi pemerintah Indonesia mengenai kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik dengan Korea diumumkan pada bulan Oktober 1963.

Setelah dimulainya hubungan konsuler tersebut, para pemimpin politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari tiap-tiap

Negara sering sekali melakukan kunjungan. Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia dan Korea Selatan saling menyetujui peningkatan hubungan kenegaraannya dari tingkat konsuler ke tingkat diplomatic penuh pada tanggal 18 September 1973. Perkembangan hubungan Indonesia-Korea Selatan telah menunjukkan tanda-tanda ke arah yang positif dengan dilaksanakannya kunjungan kenegaraan Presiden Megawati pada tahun 2002. Sebelum berkunjung ke Korea Selatan, Presiden Megawati terlebih dahulu melakukan kunjungan ke Korea Utara. Hal inilah yang mengejutkan masyarakat internasional. Langkah politis Presiden Megawati itu dilakukan setelah pemerintah Korea Selatan meminta pemerintah Indonesia untuk menjembatani perbaikan hubungan antarKorea dengan meminta kesediaan Korea Utara untuk memulai dialog antarKorea. Dengan peran yang dijalankan oleh Presiden Megawati tersebut, dapat diperkirakan bahwa hubungan Indonesia-Korea Selatan akan semakin kokoh (Yang, 2005).

Kerjasama bilateral kedua Negara meningkat tajam dalam dekade terakhir ini terutama sejak kedua Negara memasuki kemitraan strategis yang ditandai dengan penandatanganan Joint Declaration on Strategic Partnership oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun pada tanggal 4 Desember 2006. Joint Declaration tersebut mencakup 3 pilar kerjasama, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi; dan kerjasama sosial budaya.

Dalam bidang politik, hubungan kedua Negara terus terjaga dan semakin erat dengan intensitas kunjungan dari kedua belah pihak. Hal ini terbukti dengan :

- a. Kunjungan yang dilakukan Presiden RI ke Busan dalam rangka *Commemorative Summit ASEAN-ROK* ke-25 pada 10-12 Desember 2014.
- b. Presiden Joko Widodo dan Presiden Park Geu-hye melakukan pertemuan bilateral pada 11 Desember.

- c. Presiden Park Geun-hye memberikan penganugerahan "*The Grand Order of Mugunghwa*" kepada mantan Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 November 2014. Penghargaan tersebut diberikan berkat peran aktif dan kontribusi signifikan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dalam memajukan dan memperkuat hubungan Indonesia-Korea Selatan baik dalam konteks bilateral, regional maupun multilateral.
- d. Pengesahan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua *Global Green Growth Institute (GGGI)* yang baru menggantikan mantan ketua GGGI yang juga mantan PM Denmark Lars Lokke Rasmussen dengan masa jabatan dua tahun, pada 18 November 2014.
- e. Pada 22 Desember 2014, Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Mr. Chubg Ui-hwa berkunjung ke Jakarta dan courtesy call ke Presiden RI. Mr. Chung Ui-hwa dalam pertemuan tersebut mengungkapkan mengenai kesiapannya untuk meningkatkan kerjasama maritime yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia.
- f. Ketua DPD RI Irman Gusman dan delegasi melakukan kunjungan ke Korea Selatan dan bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Republik Korea Hon Chung Ui-Hwa, beliau merupakan orang kedua di Korea Selatan
- g. Wakil Ketua BPK Bapak Sapto Amal Damandari dan delegasi melakukan kunjungan ke Korea Selatan dan bertemu dengan Ketua Board of Audit and Inspection ROK Hon. Hwang Chan-hyun.
- h. Wakil Ketua DPD RI GKR Ratu Hemas dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI melakukan kunjungan ke Korea Selatan pada tanggal 16-17 September 2014.

Dalam bidang ekonomi, sejak tahun 2007 kedua Negara telah menyelenggarakan pertemuan tahunan untuk

membentuk Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation (JTF-EC). Namun pada tahun 2011, Indonesia-Korea JTF-EC direvitalisasi menjadi Working Level Task Force Meeting (WLTFM) yang melakukan pertemuan dua kali setahun untuk mengakomodasi perkembangan yang signifikan dalam kerjasama ekonomi kedua Negara tersebut. Investasi Korea Selatan di Indonesia juga banyak sekali, terutama di sektor industri, elektronik, telekomunikasi, konstruksi, otomotif, dan lain-lain (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014).

Dalam bidang militer, Indonesia dan Korea Selatan telah memulai kerjasama sejak awal tahun 1970-an. Namun, baru pada tahun 1974 Korea Selatan menempatkan seorang atase militernya di Kedutaan Besar Korea di Jakarta. Sebaliknya, penempatan atase militer Indonesia di KBRI di Seoul baru dimulai pada tahun 1979, yaitu dengan menunjuk Kolonel Agus Sugiarto. Kerjasama antara perwira menengah yang penting antara Korea-Indonesia melalui tukar menukar program Sesko (Sekolah Staf Komando) pernah memperkuat hubungan kemiliteran antara kedua Negara. Para perwira menengah yang pernah mengikuti Sesko dari kedua Negara tersebut tentu saja berperan penting dalam kerjasama bidang kemiliteran antara Korea dan Indonesia.

Saat ini, dalam upaya mengembangkan alutsista buatan sendiri, Indonesia melakukan kerjasama dengan Korea Selatan. Pertahanan Korea Selatan sendiri sebagian besar masih bergantung pada Amerika. Korea Selatan baru mulai memproduksi senjatanya sendiri secara signifikan mulai tahun 1970-an. Namun, kekuatan militer yang dimiliki Korea Selatan dapat dikatakan masih berada dibawah Amerika Serikat, Rusia, dan China.

Kerjasama pertahanan yang kedua negara ini lakukan yaitu kerja sama di bidang pertahanan (Defence Cooperations Agreement/DCA) tahun 2013, MoU kerja sama logistik dan

industri pertahanan tahun 1990 dan tahun 1995, serta pengaturan kerja sama antara TNI dan Angkatan Bersenjata Korea Selatan tentang kerja sama saling mendukung logistik MLSA (*Mutual Logistics Support Arrangement*) tahun 2011.

Untuk meningkatkan program kerjasama di bidang industri pertahanan, kedua Negara membuat proyek pengembangan militer gabungan, Jet tempur KFX (Korea Fighter Xperiment) /IFX (Indonesia Fighter Xperiment) dan kerjasama dalam pembangunan 3 kapal selam.

1. Proyek pengembangan militer gabungan, Jet tempur KFX (Korea Fighter Xperiment) /IFX (Indonesia Fighter Xperiment).

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia memperoleh ajakan dari Korea Selatan untuk bekerjasama dalam program transfer teknologi untuk proyek pengembangan pesawat tempur yang mempunyai rentang spesifikasi teknis diantara generasi 4 dan 5. Proyek pesawat tempur tersebut dinamakan dengan *Indonesian Fighter Experiment/Korean Fighter Experiment (KFX/IFX)*. Penandatanganan nota kesepahaman (MOU) kerjasama tersebut telah dilakukan pada 15 juli 2010 yang lalu di Seoul-Korea selatan.



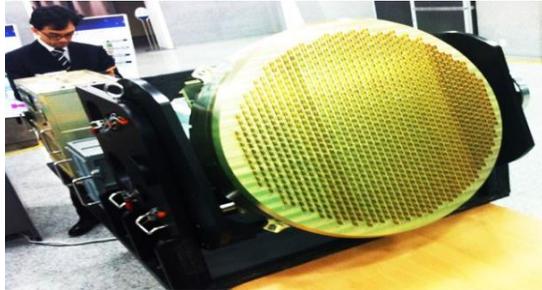
**Gambar 3. 1 Rancangan Pesawat Tempur  
KFX/IFX**

*Sumber :Jakartagreater.com*

Kerja sama ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu *Technology Development Phase* (TDP), *Engineering and Manufacturing Development Phase* (EMDP), dan *Production Development Phase* (PDP). Pemerintah Korea akan menanggung 60 persen biaya pengembangan pesawat, sejumlah industri dirgantara Negara itu diantaranya Korean Aerospace Industry menanggung 20 persennya, dan pemerintah Indonesia akan menanggung 20 persen.

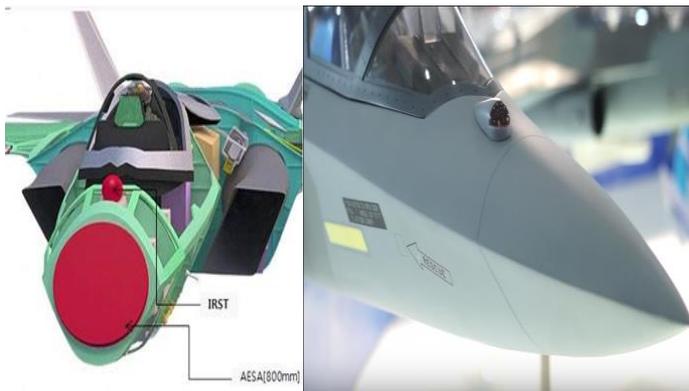
Dalam pembangunan pesawat tempur KFX/IFX ini, Korea Selatan menggandeng *Korean Aerospace Industry (KAI)* sebagai kontraktor. KAI terpilih sebagai satu-satunya perusahaan yang mampu memenuhi ketentuan pemerintah mengalahkan *Korean Airlines (KAL)*. KAI merupakan sebuah perusahaan kedirgantaraan Korea Selatan, awalnya *JV Samsung Aerospace, Daewoo Heavy Industries (divisi aerospace)*, dan *Hyundai Space and Aircafy Company (HYSA)*, yang pada tahun 1999 mengambil alih anggota pendirinya atas perintah dari pemerintah Korea menyusul masalah keuangan mereka yang muncul dalam krisis keuangan tahun 1997. KAI membuat komponen dan suku cadang untuk pesawat militer serta membangun pesawat lengkap seperti helikopter KAI Surion, juga pesawat tanpa awak. KAI juga masuk kedalam 100 besar perusahaan pertahanan dunia (Karim, 2014).

Sedangkan Indonesia menggandeng PT Dirgantara dalam kerjasama pembangunan pesawat tempur tersebut. PT Dirgantara Indonesia merupakan BUMN yang bergerak di bidang pembuatan pesawat dan peralatan penerbangan, yang juga menjadi salah satu pemain utama industri pertahanan dalam negeri (Karim, 2014).



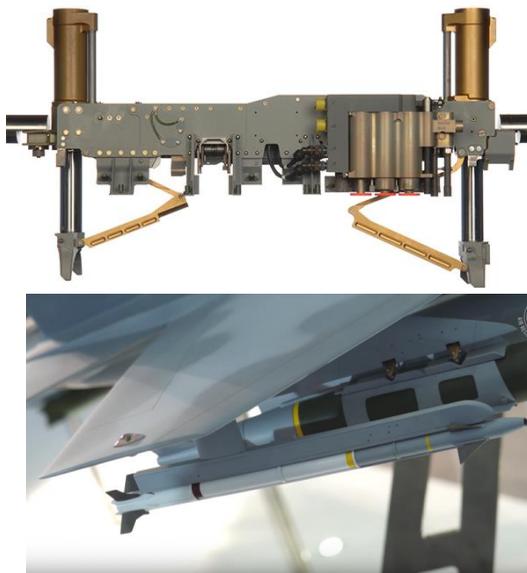
**Gambar 3. 2 Radar AESA**  
*Sumber :Jakartagreater.com*

Pesawat tempur ini diklaim memiliki kemampuan yang sama seperti F-16. Salah satu keunggulan yang dimiliki yaitu memiliki sebuah sistem *warning radar receiver* sama seperti yang ada pada pesawat F-16. Korea Selatan berfokus pada pengembangan radar AESA (*Active electronically scanned array*) buatan dalam negeri. Badan Pengembangan Pertahanan atau *Agency Defense Development (ADD)* Korea Selatan akan mengembangkan radar pesawat tersebut, dengan prototipe pertama ditargetkan siap di pertengahan tahun 2020. Pengembangan radar pesawat ini dilakukan dengan Hanhwa Thales, pihak yang memenangkan tender kompetitif untuk proyek ini pada awal 2016. Alasan Korea Selatan dalam mengembangkan sendiri radar AESA yaitu karena keputusan Washington DC yang tidak memberikan izin ekspor kepada Korea Selatan untuk teknologi radar AESA pada tahun 2015.



**Gambar 3. 3 IRIS-T dan AESA yang terdapat pada Pesawat Tempur KFX/IFX**  
 Sumber :*Jakartagreater.com*

Pesawat tempur KFX/IFX ini juga akan dilengkapi dengan rudal udara ke udara MBDA Meteor dan Diehl IRIS-T. IRIS-T (*Infra Red Imaging System Tail/ Trust Vector-Controlled*) merupakan program yang dipimpin Jerman untuk mengembangkan rudal udara ke udara infra merah jarak pendek untuk menggantikan Sidewinder AIM-9 yang digunakan di beberapa Negara anggota NATO. IRIS-T ini terletak di depan kokpit yang berbentuk seperti bola. Pesawat ini juga dilengkapi dengan targeting pod yang berfungsi untuk membantu mengakuisisi target high value di darat.



**Gambar 3. 4 Missile Eject Launcher**

*Sumber :Jakartagreater.com*

Selain itu alat ini nantinya juga akan dilengkapi dengan sejumlah unit Peluncur Rudal/ *Missile Eject Launcher (MEL)*. Cobham Mission Systems, sebuah perusahaan yang berbasis di Wimborne, Inggris telah mendapatkan kontrak dari *Korean Aerospace Industries (KAI)* untuk menyediakan peralatan pengangkut senjata dan pelepasannya untuk pesawat tempur multi fungsi generasi masa depan KFX/IFX. Cobham akan mengirimkan sejumlah unit Peluncur Rudal/ *Missile Eject Launcher (MEL)* ke KAI pada tahun 2020 untuk pesawat tempur KFX/IFX. Alat ini adalah *long stroke ejection system* yang sangat kuat yang memungkinkan pengangkutan dan pelepasan rudal udara ke udara

jenis Meteor atau AMRAAM tanpa perubahan peran. Pesawat tempur KFX/IFX juga akan memiliki versi kursi tunggal dan ganda yang didukung oleh dua mesin General Electric F414. Mesin ini mempunyai daya dorong 25.500 pound, mesin ini pengembangan dari seri F404 yang dipakai oleh jet tempur Boeing F18 Hornet dan jet latih/tempur ringan T/A 50 Golden Eagle yang telah dipakai oleh TNI AU (Forum militer, 2017).



**Gambar 3. 5 Pesawat Tempur  
KFX/IFX Memiliki Versi Kursi Tunggal  
dan Ganda yang didukung oleh Dua Mesin  
General Electric F414**

*Sumber:Jakartagreater.com*

Proses pengembangan pesawat ini direncanakan selama 10 tahun dengan biaya diperkirakan sebesar 6 Miliar USD untuk proses pembuatan prototipe pesawat. Dalam kerjasama ini, PT Dirgantara Indonesia dengan KAI akan melaksanakan kerja sama yang meliputi fase produksi pesawat tempur KFX/IFX termasuk perawatan, modifikasi, dan pembaruan. Hingga kini, proyek pengembangan pesawat tempur ini telah mencapai 14% dari total pengerjaan alat utama sistem pertahanan. Saat ini sedang menempuh fase manajemen rekayasa dan pengembangan atau yang

biasa disebut *Engineering and Manufacturing Development Phase* (EMDP) dan diperkirakan rampung pada 2026. Dalam fase ini, Indonesia akan mengirimkan tim engineer ke Korea Selatan sebagai bentuk partisipasi di seluruh area kegiatan pengembangan pesawat tempur KFX/IFX, yang meliputi bidang-bidang rancang bangun pesawat, kendali terbang, sistem integrasi senjata, manajemen program, pengujian dan sertifikasi di *Korean Aerospace Industry*.

Desain final dari pesawat tempur ini diharapkan terwujud pada bulan Juni 2018, dimana saat itu pembuatan desain rinci akan dimulai. Tahap perancangan rinci untuk jenis bermesin ganda akan dilakukan sampai akhir 2019, dimana produksi prototype akan dimulai. Penerbangan pertama dari pesawat KFX direncanakan pada pertengahan tahun 2022, dengan pengujian dan evaluasi berjalan sampai 2026 (Forum militer, 2017).

## 2. Kerjasama pembangunan 3 kapal selam

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia telah memesan tiga kapal selam dari Korea Selatan. Kapal selam tersebut dipesan Indonesia dari *DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering)*. Kerja sama ini menggunakan skema *Transfer of Technology (TOT)* dengan PT PAL Indonesia. DSME adalah kontraktor kapal yang khusus dalam membangun berbagai kapal, seperti kapal selam, kapal perusak dan lain-lain. DSME membangun kapal motor berteknologi tinggi menggunakan peralatan canggih. DSME memproduksi produk berkualitas tinggi berdasarkan keahlian TI yang luas, teknologi pembuatan kapal yang dikelola dengan baik, kapasitas konstruksi platform tetap yang

luar biasa, pengetahuan manajemen proyek berskala besar, dan teknologi konstruksi kapal selam / perusak.

Kapal selam pertama dan kedua dibangun di perusahaan pembuatan kapal Korsel Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Sedangkan kapal selam ketiga dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia, Surabaya, bekerja sama dengan DSME Korsel (Denita, 2017). Produsen kapal selam Korea Selatan nantinya akan membagi ilmunya dan datang ke Indonesia untuk membimbing PT PAL Indonesia untuk membuat kapal selam sendiri. Pada saat perancangan dan perekayasaan kapal selam pertama dan kedua dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran bagi peserta dari PT PAL, kemudian untuk kapal selam ketiga pembangunannya dalam bentuk blok-blok yang dilaksanakan di Korea tetapi teknisi PT PAL sudah ikut berpartisipasi, kemudian perangkaiannya akan dilaksanakan di PT PAL Indonesia. Dalam kerjasama tersebut, Kementerian Pertahanan mengirimkan sebanyak 52 sampai 104 teknisi ke Korea Selatan untuk menyelesaikan pembangunan kapal selam pertama. Tenaga-tenaga ahli tersebut tidak hanya sebatas *learning by seeing* ( belajar dengan cara mengamati), namun juga *learning by doing* (belajar dengan cara mempraktikan).

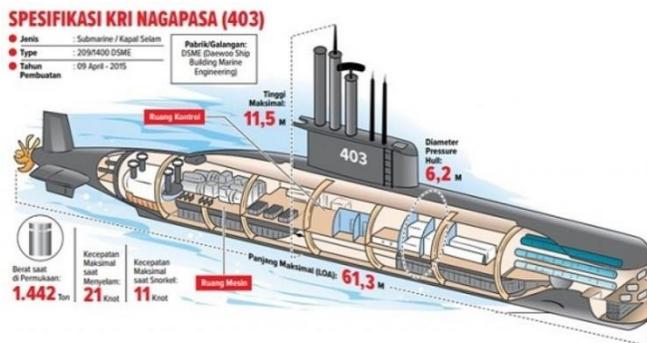
Chang Bogo adalah versi perbaikan dari Type 209 Jerman, tapi dibangun di Korea Selatan di bawah lisensi. Harga kapal selam ini tergolong murah, untuk harga 3 kapal selam yaitu USD 1 miliar, sedangkan dari negara lainnya harga per unit bisa mencapai USD 450 juta-USD 500 juta.



**Gambar 3. 6 KRI Nagapasa 403 Pesanan  
TNI AL dari Korea Selatan Tiba di Dermaga  
Ujung, Surabaya**

*Sumber : Tempo.co*

Indonesia telah menerima kapal selam pertama dari tiga kapal selam yang dipesan. Kapal selam tersebut yaitu KRI Nagapasa-403. Serah terima KRI Nagapasa 403 itu dilakukan oleh CEO & Presiden *Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Co Ltd*, Jung Song-leep dan Menhan Ryamizard Ryacudu, serta dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi, Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, dan Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan Sumardjono. Kapal selam tersebut telah tiba di Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2017 yang lalu.



**Gambar 3. 7 Spesifikasi KRI Nagapasa 403**

Sumber :*Breakingnews.co.id*

Kapal selam ini menjadi kapal selam type 209/1400 pertama untuk Angkatan Laut Indonesia, sekaligus menjadi kapal selam yang di ekspor pertama oleh Korea Selatan. KRI Nagapasa memiliki berat selam 1.400 ton, memiliki panjang 61.3 meter dan lebar 7.6 meter dengan kecepatan  $\pm$  21 knot dibawah air. KRI Nagapasa 403 ini mampu berlayar lebih dari 50 hari dan menampung 41 kru untuk menunjang fungsi (Puri, 2017). Kapal selam ini dipersenjatai torpedo berukuran 533 mm dengan fasilitas delapan buah tabung peluncur (Yohanes & Artika, 2017). Secara umum, kapal selam ini memiliki beberapa kelebihan dari sisi teknologi, seperti *State of The Art Technology*, yang meliputi *Latest Combat System*, *Enhanced Operating System*, serta *Non-hull Penetrating Mast and Comfortable Accommodation*. Kapal selam ini juga dirancang untuk mampu menyebarkan ranjau laut, meluncurkan rudal antikapal

permukaan, serta melepaskan Torpedo Counter Measure (TCM) (Destrianita, 2016). Kapal selam kedua juga akan memiliki spesifikasi yang sama dengan KRI Nagapasa 403. Kapal selam kedua direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018. Sedangkan untuk kapal selam ketiga, target pembangunannya 2,5-3 tahun (Denita, 2017).

## **B. Kerjasama Pembuatan Alutsista antara Indonesia dengan Amerika**

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Amerika menunjukkan hubungan yang baik sejak periode Presiden Barack Obama dengan tercapainya Kemitraan Menyeluruh (*Comprehensive Partnership Agreement*) pada tahun 2010. Kesepakatan tersebut meliputi kerjasama dalam bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang sosial budaya, bidang pendidikan, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungan kedua Negara semakin kuat dengan dilaksanakannya *The 4<sup>th</sup> Joint Commission Meeting* di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2014, kemudian kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Washington DC pada tanggal 27 September 2014 dan pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan presiden Barack Obama di sela-sela pertemuan APEC di Beijing pada tanggal 10 November 2014.

Dalam bidang ekonomi, telah tercatat adanya peningkatan disektor perdagangan dan investasi. Nilai perdagangan Indonesia-Amerika pada tahun 2013 berdasarkan data *US Department Commerce* mencapai nilai tertinggi dengan total US \$ 27,97 miliar. Investasi-investasi Amerika di Indonesia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Investasi tersebut mencakup beberapa proyek seperti pertambangan, industri alat angkut dan transportasi, makanan, industri kimia dan konstruksi. Amerika merupakan investor asing terbesar ketiga di Indonesia.

Dalam bidang sosial budaya, KBRI menggunakan pendekatan *people to people* untuk mempromosikan seni budaya dan kuliner Indonesia. Kuliner Indonesia telah dipromosikan KBRI kepada mahasiswa Amerika, seperti mahasiswa di *Stratford Univesity* dengan menghadirkan seorang *chef* dari Indonesia. Selain itu juga diadakan “Annual Event: Performing Indonesia 2014: Music Dance Ana Theater Krom West Java “ untuk kedua kalinya yang menampilkan pertunjukan angklung oleh 200 anak SD dari Washington DC, Maryland dan Virginia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).

Sedangkan dalam bidang militer, Indonesia melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat di mulai pada tahun 1950-an. Amerika memiliki peran yang besar dalam proses pengakuan kedaulatan Indonesia. Amerika berhasil memaksa Belanda untuk bersungguh-sungguh dalam perundingan dan mengakui kemerdekaan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Hal tersebut kemudian mengawali hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika. walaupun dengan adanya pasang surut dalam hubungan bilateral tersebut. Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia merupakan hubungan yang bisa dianggap sebagai *Love and Hate Relationship*, terkadang bisa dekat namun terkadang bisa menjadi renggang.

Pada tahun 1970-an, Indonesia sangat gencar dalam meningkatkan kerjasama militer dengan Amerika. Pada saat itu, Indonesia banyak melakukan pengadaan peralatan militer baik itu pesawat tempur, maupun pesawat angkut yang banyak didominasi oleh produk buatan Amerika. Dalam kerjasama militer yang kedua Negara lakukan, mereka bersepakat dalam pembelian senjata militer, seperti pesawat tempur, helikopter dan peralatan perang lainnya. Selain itu, kedua Negara juga sepakat untuk melaksanakan program pelatihan dan pendidikan militer internasional (IMET).

Namun pada tahun 1999, Amerika menjatuhkan embargo senjata kepada Indonesia, menyusul kekerasan pasca-referendum di Timor Leste tahun itu. Pihak yang paling dirugikan ketika embargo terjadi yaitu Angkatan udara karena embargo militer tersebut memutus pasokan suku cadang pesawat-pesawat tempur AU yang dibeli dari AS. Banyaknya peralatan militer yang didominasi oleh produk buatan Amerika tersebut mengakibatkan ketergantungan sistem pertahanan udara terhadap Amerika dan dampak dari penerapan embargo tersebut mengakibatkan menurunnya kekuatan dan kemampuan TNI sehingga kesiapan operasi pun mengalami hambatan serius.

Kemudian pasca tragedi 11 September di New York, embargo ini mengendur. Sejak 2002 beberapa lembaga kementerian Amerika meluncurkan inisiatif jutaan dolar untuk Indonesia terkait kepentingan keamanan dan pertahanan. Pemerintah Amerika juga kembali meneruskan program International Military education and Training (IMET), yang sempat terhenti sejak 1999 sampai 2002. Lima tahun kemudian, Kongres mengizinkan secara terbatas akses Indonesia ke hibah dan pinjaman untuk peralatan dan pelatihan militer. Selama 2001 hingga 2004 pemerintah AS telah memberikan bantuan militer senilai \$23,2 juta (Jusuf, 2017).

Pada tahun 2011, Indonesia telah menandatangani kesepakatan dalam pembelian 24 jet F-16 bekas dari Amerika senilai US\$ 750 juta. Proyek tersebut dinamakan Peace Bima Sena II, menyusul Peace Bima Sena I pada tahun 1986. Apabila ada sistem alutsista yang tidak lagi diperlukan, Amerika biasanya menawarkan alutsista tersebut untuk dibeli oleh Negara mitranya dengan biaya 5 sampai 50% dari harga awal. Namun dibawah Undang-undang Pengawasan Ekspor Senjata dan Bantuan Asing, Amerika bisa mengambil alih biaya tersebut dan memilih Negara untuk diberikan secara

cuma-Cuma.Indonesia sebagai Negara mitra Amerika mau menjalin kesepakatan dalam pembelian pesawat F-16 tersebut.

Indonesia secara keseluruhan meminta hibah 30 jet tempur, yakni 24 unit F-16 Block 25 untuk diremajakan , empat F-16 Block 25 dan dua unit F-16 Block 15 untuk dibongkar dan dipakai sebagai suku cadang. Amerika juga memberikan 28 unit mesin Pratt and Whitney F100 Turbopan bekas yang juga digunakan untuk F-15 Eagle. Sebagai syarat dalam kesepakatan tersebut, Indonesia diminta menyediakan dana untuk meremajakan 24 F-16 dan 28 mesin tersebut. Pesawat F-16 ini akan mendapat sistem computer teranyar, Modular Mission Computer (MMC). Sistem komputer ini bertugas menyinergikan sistem persenjataan, pengintaian dan navigasi di dalam pesawat. Pesawat ini juga akan dilengkapi dengan sensor pengindraan auh model teranyar dan mampu mengangkat lebih banyak amunisi. Pada tanggal 28 febuari 2018, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) resmi menerima 24 unit pesawat tempur F-16 C/D dari Amerika Serikat. 24 Unit Pesawat F-16 tersebut rencananya akan ditempatkan di Skadron Udara 16 Lanud Pekanbaru sebanyak 16 unit, sedangkan 8 unit lagi akan ditempatkan di Skadron Udata 3 Lanud Iswahyudi (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2018).

Sebelum dikirim ke Indonesia, jet tempur tersebut harus diperbaiki dan diupgrade terlebih dahulu. Biaya perbaikan inilah yangdibebankan kepada Negara penerima hibah seperti Indonesia. Semua suku cadang yang digunakan untuk melakukan perbaikan dan upgrade dijamin masih baru dan asli. Untuk biaya perbaikan (rekondisi) 24 F-16 C/D Pemeintah RI telah mengeluarkan anggaran sekitar 6 triliun rupiah. Dalam aturan hibah negara penerima hibah jet-jet tempur biasanya juga tidak bersama persenjataannya. Meskipun semua sistem persenjataan dalam pesawat berfungsi maksimal dan tidak dicopot, jika mau persenjataannya, negara

penerima hibah harus membeli. Jadi program hibah jet tempur memang tidak gratis.

Kekuatan militer Amerika dapat dikatakan sebagai kekuatan militer terbesar sejagad. Kekuatan militer AS tak hanya mengandalkan kuantitas alat perang. Tetapi juga memiliki jumlah yang sangat banyak, bahkan tidak ada senjata tua. Hampir semua senjata yang dimiliki merupakan senjata yang baru dan canggih. AS juga memiliki pesawat generasi terbaru seperti F-22 Raptor yang dapat merontokkan pesawat tempur mana pun di dunia. Di bagian darat dan laut pun AS memiliki superior dari segi statistik (Daranova, 2016).

### **C. Kerjasama Pembuatan Alutsista antara Indonesia dengan Rusia**

Hubungan diplomatik antara kedua negara ini dimulai pada tanggal 3 Februari 1950, pada saat Uni Soviet berada dibawah pemerintahan Nikita Khrushchev dan Indonesia berada dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Adanya persamaan sikap dan pandangan membuat persahabatan antara kedua Negara ini semakin kuat. Jatuhnya Uni Soviet dan berakhirnya era Perang Dingin tahun 1989 mempengaruhi perubahan peta politik internasional, termasuk mempengaruhi hubungan Indonesia-Uni Soviet. Hubungan kerjasama kedua Negara ini menjadi vakum. Kemudian, Rusia mulai berdiri sebagai Negara pengganti Uni Soviet. Kemudian Presiden Megawati mulai membangun hubungan kerjasama dengan Rusia lagi. Setelah pemerintahan Presiden Megawati, hubungan Indonesia-Rusia mulai membaik.

Sepanjang tahun 2014, hubungan Indonesia dengan Rusia semakin kokoh. Hal ini dikarenakan adanya Deklarasi tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam Abad ke 21 tahun 2013, saling kunjung dan komunikasi pada tingkat pimpinan Negara yang semakin intens, dan kesepakatan-

kesepakatan baru yang membuat kerjasama bilateral antara kedua Negara ini menjadi semakin berkembang. Kedua Negara ini menjalin kerjasama diberbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan pertahanan militer.

Dalam bidang politik, kerjasama kedua Negara semakin meningkat dengan adanya kunjungan antar pejabat kedua Negara baik di lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Pada tahun 2014, kunjungan pejabat penting Indonesia ke Rusia yaitu diantaranya kunjungan Ketua Mahkamah Agung RI pada Oktober 2014, kunjungan Ketua dan Sekjen Mahkamah Konstitusi RI pada November 2014, kunjungan Ketua Badan Tenaga Nasional Nuklir pada Juni 2014, Kunjungan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Juni 2014 dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Februari 2014. Di tingkat kepala pemerintahan telah dilakukan pertemuan bilateral Presiden RI, Joko Widodo dengan Presiden Putin di sela-sela KTT APEC tanggal 10 November 2014 di Beijing. Kedua Presiden membahas isu-isu bilateral, regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. Selain itu kedua Negara juga membahas mengenai kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi.

Dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan, kedua Negara secara rutin membahasnya dalam kerangka Sidang Komisi Bersama (SKB) dibawah koordinasi menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Deputy Perdana Menteri Rusia. SKB membawahi kerjasama bidang perdagangan, industri, investasi, sosial budaya, energy, transportasi dan infrastuktur yang dibahas secara detail dalam 5 *working group*. Dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia, khususnya di bidang pertanian dan peternakan, pada tanggal 28 Oktober 2014 diselenggarakan *Indonesia Agriculture Investment Forum (IAIF) 2014* di Moskow. Dalam forum tersebut hadir wakil-wakil dari 13 provinsi di Indonesia yang mempresentasika potensi pertanian masing-masing

daerah, pameran promosi serta mengadakan *one-on-one business meeting* dengan calon investor dan pebisnis Rusia.

Untuk meningkatkan wisatawan Rusia ke Indonesia, selama tahun 2014 KBRI Moskow turut berpartisipasi dalam berbagai pameran internasional di Rusia seperti *World Food Expo*, *Golden Dolphin*, *Pacific International Tourism Expo* (PITE), *Otdykh Leisure*, FIDE Expo, dan Halal Expo. Pameran-pameran tersebut menghadirkan berbagai perusahaan industri makanan, pelaku bisnis, UKM, *tours operators*, dan lain-lain. Dalam bidang pendidikan, KBRI Moskow telah menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas besar di Rusia. Kerjasama yang dilakukan seperti pengiriman tenaga pengajar Indonesia secara rutin setiap tahun ke sejumlah universitas di Rusia untuk mengajar materi bahasa Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015).

Dalam bidang militer Rusia memberikan dukungan penuh terhadap Indonesia. Pada saat operasi pembebasan Irian Barat, Uni Soviet memberikan dukungan militer bagi Indonesia berupa pesawat tempur yang didatangkan langsung dari Rusia. Rusia memiliki tank terbesar di dunia dan pesawat militer kedua terbesar di dunia. Rusia dikenal sebagai negara dengan perlengkapan militer yang mumpuni. Industri perlengkapan dan peralatan militer Rusia cukup maju, misalnya industri pesawat tempur, yang menghasilkan MiG dan Sukhoi serta helikopter, pesawat terbang, tank, rudal dan persenjataan ringan seperti senjata Kalashnikov. Ada juga industri berat seperti baja, pertambangan mineral, batu bara dan minyak bumi.

Kerjasama pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan Rusia berupa penjualan senjata dan alat pertahanan buatan Rusia kepada Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dan Rusia sepakat untuk membentuk Komisi Kerjasama Teknik Militer (KKTM). Pembentukan KKTM ditandatangani dalam Sidang

Komisi Pertama di Rusia pada tanggal 22 September 2005. Selain itu kedua Negara juga sepakat mengenai implementasi kerjasama militer 2006-2010. Rusia memberikan *state credit* 1 miliar dollar AS bagi pengadaan persenjataan Indonesia untuk masa 2006-2010. Kredit Negara ini memiliki keunggulan berupa efisiensi, karena tidak memakai *management fee* dan syarat lainnya. Departemen pertahanan RI menggunakan pinjaman yang diberikan Rusia untuk pengadaan 10 helikopter MI-17-V5 dan 5 Helikopter MI-35P beserta persenjataannya bagi TNI AD. Sejak tahun 2000-an, Indonesia juga membeli beberapa pesawat dari Rusia, diantaranya seperti Pesawat Su27/flanker, pesawat Su30/Flanker (2003), dan Pesawat Su27/ SKM (2010).

Indonesia dan Rusia saat ini telah sepakat dalam melakukan imbal beli pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan berupa 11 pesawat tempur Sukhoi SU-35 . Harga pembelian pesawat tempur SU-35 yang mencapai USD 1,14 miliar ini memberikan potensi ekspor ke Rusia bagi Indonesia sebesar 50% dari nilai pembelian tersebut, atau senilai USD 570 juta. Pemerintah Indonesia membeli SU-35 dari Rusia sedangkan Rusia sebagai negara penjual berkewajiban membeli sejumlah komoditas ekspor Indonesia. Kesepakatan kerjasama ini telah ditandatangani pada 10 Agustus 2017 lalu saat pelaksanaan Misi Dagang ke Rusia yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan. Dalam kesepakatan tersebut Rusia telah menjamin akan membeli lebih dari satu komoditas ekspor, dengan pilihan berupa karet olahan dan turunannya, kopi dan turunannya, kakao dan turunannya, tekstil, teh dan produk-produk lainnya (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2017).

Pesawat Sukhoi Su-35 ini merupakan pesawat tempur multiperan, kelas berat, berjelajah panjang, dan bertempat duduk tunggal. Pesawat ini awalnya diberi nama Su-27M dan dikembangkan dari Sukhoi Su-27. Pesawat Sukhoi Su-35 dikembangkan untuk menandingi F-15 Eagle dan F-16

Fighting Falcon. Keinginan Indonesia dalam membeli 11 buah pesawat Sukhoi dari Rusia ini sempat terancam batal, dikarenakan masalah teknis pembayaran. Tetapi hal tersebut bisa fleksibel dan dapat dicari alternatif lainnya dan akan tetap berjalan.

Selain itu, terdapat hal lain yang menjadi kekurangan dalam kerjasama pembelian pesawat tempur tersebut. Saat ini Rusia sedang menghadapi embargo perdagangan dari Amerika, Uni Eropa, serta sekutu-sekutunya terkait isu keamanan dan territorial. Rusia membalas dengan mengenakan sanksi pembatasan impor dari Negara-negara tersebut. Akibat embargo ini, Rusia memerlukan sumber alternative untuk memenuhi kebutuhan pangannya, oleh karena itu Rusia bersedia kerjasama dengan Indonesia.

Namun disisi lain, hal ini memungkinkan Indonesia menerima embargo dari Amerika. Pemerintah Amerika telah menyatakan ketidaksukaannya terhadap Indonesia yang ingin sekali membeli Pesawat Sukhoi Su-35 dari Rusia. Ancaman embargo senjata dari Amerika ini memang bisa berakibat fatal. Apalagi Indonesia baru saja menerima sebanyak 24 jet tempur F-16 yang merupakan hibah dari AS. Embargo persenjataan dan suku cadang terhadap F-16 milik Indonesia jelas akan memperpendek usia pakai ke 24 buah pesawat tempur F-16 itu. Sedangkan embargo dari sisi persenjataan, akan membuat jet-jet tempur F-16 generasi keempat ini menjadi tidak bersenjata. Amerika khawatir jika Sukhoi Su-35 sampai dimiliki Indonesia, maka kekuatan udara Indonesia akan sulit ditandingi. Kerjasama antara Indonesia dan Rusia ini dapat menimbulkan sentiment negatif dari Amerika. Oleh karena itu sangat memungkinkan jika Indonesia akan menerima embargo dari Amerika.

#### **D. Kerjasama Pembuatan Alutsista antara Indonesia dengan China**

Hubungan diplomatik Indonesia dengan China dimulai sejak 13 April 1950. Kerjasama antara kedua Negara ini meliputi bidang politik dan keamanan, ekonomi, maritim, iptek, dan sosial budaya serta kerjasama regional dan internasional. Namun hubungan kerjasama ini sempat berhenti sejenak pada tanggal 30 Oktober 1967, karena persoalan politik di Indonesia yang sedang kacau. Kemudian hubungan tersebut mencapai titik balik dengan dimulainya normalisasi hubungan pada 8 Agustus 1990 melalui penandatanganan *MoU on the Resumption of Diplomatic Relations*. Dengan adanya normalisasi tersebut, Indonesia dan China memasuki tahap baru dalam kerjasama bilateral yang ditandai antara lain dengan saling kunjung para pejabat pemerintah dan masyarakat kedua Negara.

Hubungan kedua Negara semakin erat dengan ditandatanganinya Deklarasi Kemitraan Strategis di Jakarta pada 25 April 2005. Dalam Deklarasi tersebut, kedua negara menggarisbawahi komitmen yang kuat untuk memajukan kerjasama di berbagai bidang, dengan menjunjung prinsip-prinsip penghargaan atas kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah di masing-masing negara. Pada tanggal 21 Januari 2010, kedua negara juga telah menandatangani *Plan of Action (PoA) Deklarasi Kemitraan Strategis RI-RRT* yang akan menjadi roadmap dan acuan bagi implementasi Kemitraan Strategis kedua negara.

Hubungan bilateral kedua Negara mengalami kemajuan pesat dengan adanya peningkatan kerjasama menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun 2013. Peningkatan perekonomian yang dialami kedua Negara menjadi daya tarik warga kedua Negara, baik untuk kepentingan perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, maupun budaya. Di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing, Presiden Indonesia dan Presiden China melakukan pertemuan bilateral. Menteri luar negeri Indonesia juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar negeri China di Jakarta pada tanggal 3 November 2014

Dalam kerjasama ekonomi, telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Sektor energi juga merupakan salah satu bidang penting dalam hubungan bilateral Indonesia-China. Di samping itu, kedua negara juga terus mendorong peningkatan hubungan sosial-budaya melalui *people-to-people contacts*.

Dalam kerjasama pertahanan, kerjasama yang dilakukan kedua Negara ini mencakup kerjasama di bidang kelembagaan, kerjasama di bidang pertukaran dan alih teknologi, pembelian senjata, serta bidang pendidikan (pertukaran siswa militer) dan pelatihan. China merupakan Negara dengan kekuatan militer terbesar ketiga. Jumlah persenjataan yang dimiliki China seperti tank ACV (*Armoured Combat Vehicle*), dan artileri patut diperhitungkan. Serta kapal selam yang dimiliki China yaitu sebanyak 69 unit, termasuk didalamnya kapal yang dipersenjatai dengan peluru kendali. Begitu pula dengan Angkatan Udaranya, China menempati urutan teratas untuk kekuatan pesawat tempur jenis *fighter* di Asia pasifik. China, Rusia, dan Amerika Serikat merupakan tiga Negara yang memiliki angkatan udara terkuat dengan dukungan pesawat tempur yang besar (Sinaga, 2013).

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia dan China telah meratifikasi perjanjian pertahanan yang dibuat sebagai payung hukum untuk pertahanan masa depan kedua Negara. Indonesia dan China sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan ke tingkat yang lebih tinggi termasuk riset pertahanan, transfer teknologi dan produksi bersama. Kerjasama kedua Negara terus ditingkatkan dengan diadakannya Pertemuan Kerjasama Industri Pertahanan di Jakarta pada tahun 2012 dan dilanjutkan dengan pertemuan di Beijing pada tahun 2013. Pada pertemuan di Beijing ini kedua Negara menandatangani Letter of Intent untuk pembuatan bersama rudal anti-kapal C-705. Sebagai tindak lanjut dari kontrak tersebut, pada tahun 2015 dikirim sejumlah rudal C-705 ke Indonesia untuk dilakukan tes uji penembakan. Indonesia pun menyiapkan segala kebutuhan

untuk uji rudal tersebut. China akan menyiapkan program bagi prajurit TNI AL untuk melakukan training di China. China juga menyarankan TNI AL untuk membeli kendaraan peluncur rudal anti-kapal permukaan C-705, untuk memudahkan operasional, perawatan dan perbaikan di kemudian hari.

Uji coba penembakan pertama rudal anti-kapal C-705 ini dilakukan pada latihan armada jaya tahun 2016. Pada saat itu rudal C-705 yang ditembakkan hampir gagal meluncur karena ada kesalahan teknis. Rudal tersebut juga diduga gagal mengenai sasaran karena posisi kapal lama yang siap dihancurkan dan jadi sasaran tembak rudal masih mengapung di Selat Karimata. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena jika terjadi saat perang, jelas merupakan sebuah kerugian dan bisa dipastikan tembakan rudal meleset tidak kena sasaran.

Rudal C-705 ini memiliki hulu ledak 110 kg dengan daya jangkau 75 km dan 170 km dengan tambahan roket pendorong. Rudal ini juga dapat diluncurkan dari pesawat, kapal, dan kendaraan darat. Rudal ini sangat ideal untuk menenggelamkan kapal, daya hancurnya mencapai 95,7%. Rudal C-705 pertama kali diperkenalkan pada ajang Zhuhai Airshow ke-7 pada tahun 2008. Rudal ini akan dikembangkan dengan menfokuskan pada tiga hal yaitu elemen mesin, hulu ledak, dan sistem pemandu.

Pasca kegagalan uji coba pertama tersebut banyak pihak yang mendesak pemerintah agar membatalkan pembelian rudal tersebut. Hal dikarenakan dapat memberikan citra yang buruk bagi pemerintah Indonesia. Pakar militer China menyatakan bahwa kegagalan uji coba tersebut diakibatkan karena masalah suhu, kelembaban yang terjadi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2017, untuk kedua kalinya TNI AL melakukan uji coba penembakan rudal C-705 di perairan laut Bali. Penembakan rudal C-705 ini berhasil diluncurkan dari KRI Kujang-642 Satuan Kapal Cepat Koarmabar dengan berhasil mengenai tepat pada sasaran Ex

KRI Karimata-960. Sebelum penembakan, telah dilaksanakan persiapan secara matang dari mulai persiapan teknis peraan serta persiapan kemampuan prajurit dengan melaksanakan latihan-latihan taktis berupa prosedur penembakan rudal dan lain-lain (Forum militer, 2017).

Kerjasama pembuatan rudal ini diharapkan dapat menambah keuntungan bagi pengembang kemampuan rudal Cruiser RX 420 buatan LAPAN (Lembaga penerbangan dan Antariksa Nasional) yang ditargetkan memiliki daya jangkau 300 Km lebih. Saat ini LAPAN sedang mengembangkan rudal tersebut. Rudal Lapan RX-420 sudah diuji coba beberapa kali. Tetapi hingga kini masih ada kendala dalam keakuratan daya jelajah, dalam mencapai target sasaran secara presisi. Jika teknologi cruiser telah dimiliki para pakar rudal Indonesia, munculnya rudal RX-420 versi militer, akan menggetarkan negara-negara tetangga. Namun, disisi lain kerjasama antara Indonesia dan China ini juga bisa menimbulkan sentiment negatif dari Amerika. Hal ini dikarenakan perbedaan ideologi yang dimiliki Amerika dan China. Seperti halnya dengan kerjasama Indonesia dengan Rusia, Amerika bisa saja melakukan embargo senjata kepada Indonesia.